

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI PUSKESMAS SALOPA KABUPATEN TASIKMALAYA

Nurhayati Wijaya

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: *nurhayati@gmail.com,

ABSTRAK

Fasilitas kesehatan merupakan tempat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang masih menjadi tumpuan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelayanan kesehatan oleh Puskesmas masih mengalami berbagai hambatan dalam memberikan pelayanan prima dengan berbagai keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian yaitu mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Salopa Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara secara mendalam. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu melalui reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian implementasi kebijakan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Salopa Kabupaten Tasikmalaya ditentukan oleh variable idealized policy, target group, implementing organization, dan environmental factors. Dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai hambatan sehingga perlu adanya strategi dalam mencapai hasil yang diharapkan dengan menerapkan seluruh isi peraturan tersebut.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Standar Pelayanan Minimal, Pusat Kesehatan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki tugas dan bertanggungjawab dalam menjamin kesehatan masyarakatnya, dan semua warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mengakses layanan publik yang berkualitas yang hemat biaya, efisien, efektif, transparansi, dan akuntabilitas dalam menerima layanannya didasarkan atas standard pelayanan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya kesehatan masyarakat

yang baik dapat mendorong terhadap berbagai sector pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah.

Pelayanan publik bidang kesehatan merupakan layanan penting yang dibangun untuk membantu memperjelas fungsi lembaga kesehatan masyarakat dalam masyarakat. Terdapat beberapa komponen dalam pelayanan kesehatan masyarakat, diantaranya penilaian, pengembangan kebijakan, dan penjaminan. Penilaian tersebut memberikan waktu bagi lembaga dan kementerian untuk memeriksa kesehatan masyarakat secara luas, hal tersebut untuk menganalisis dan berbagi data yang dikumpulkan tentang kesehatan masyarakat. Titik fokus untuk pengembangan kebijakan yaitu menggunakan informasi yang diketahui yang telah dikumpulkan di atas dan mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi masalah kesehatan di komunitas mereka.

Jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan melibatkan lembaga kesehatan masyarakat yang menyediakan program yang mungkin dibutuhkan secara khusus bagi masyarakat, yang dikelola baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Secara keseluruhan, memastikan masyarakat memiliki layanan yang dibutuhkan untuk berkembang dalam lingkungan yang sehat. Pelayanan kesehatan lengkap saat ini sangat dibutuhkan masyarakat terutama penduduk yang berada di daerah-daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai.

Pengembangan kebijakan bidang kesehatan sangat penting dilakukan oleh pemerintah, sebagai upaya mendorong upaya individu dan bersama-sama untuk membantu tercapainya kesehatan masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan terkait dengan pelayanan kesehatan agar pelayanan kesehatan dapat memenuhi standar yang diharapkan dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Secara keseluruhan, pengembangan kebijakan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kesehatan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan kembali kesehatannya, yang akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan bangsa.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan perlu dilakukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pelaksanaan SPM tersebut di tingkat puskesmas diperlukan pedoman pengendalian berbagai penyakit yang di derita pasien, selain memerlukan standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan masyarakat. Pada kenyataannya berbagai hambatan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan SPM cukup bervariasi terutama pada tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas yang berada di daerah-daerah terpencil.

Salah satu Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya yang masih memiliki hambatan dalam penyelenggaraan layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu terjadi di UPTD Puskesmas Salopa. Adapun luas wilayah kerja mencapai 10.899 km², dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai 48.940 jiwa, dengan rasio beban tanggungan sebesar 11,4 per 100 penduduk produktif. Fasilitas layanan terdiri dari Puskesmas keliling sebanyak 1 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 5 buah, jumlah apotek sebanyak 2 buah, dan Posyandu

sebanyak 77 buah, dan hanya 77% Posyandu dengan kategori aktif, disamping adanya Polindes sebanyak 5, dan Posbindu sebanyak 9 buah.

Derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Salopa pada tahun 2020 diketahui jumlah lahir hidup sebanyak 856 jiwa, dengan angka lahir mati sebanyak 4 jiwa, sementara untuk jumlah bayi mati diketahui sebanyak 2 bayi. Selanjutnya dari data yang diperoleh jumlah angka kematian bayi sebanyak 4, dengan jumlah kematian ibu sebanyak 2 orang. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pihak Puskesmas berkaitan dengan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan peserta jaminan pemeliharaan kesehatan mencapai 77,04%, dan cakupan kunjungan rawat jalan mencapai 23,55%. Adapun angka kejadian terhadap kematian bayi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Salopa pada tahun 2019 sebanyak 5 bayi, dan pada tahun 2020 sebanyak 8 bayi, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 4 bayi.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan masih adanya beberapa hambatan dalam pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) oleh UPTD Puskesmas Salopa, dimana dari hasil penjajagan ditemukan beberapa fenomena yang terjadi, diantaranya dorongan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan SPM belum sesuai dengan yang diharapkan, sebagai contoh masih adanya kasus kematian terhadap bayi dan ibu melahirkan berdasarkan data yang diperoleh, hal tersebut menunjukkan pelayanan dasar yang tertuang dalam peraturan tentang SPM belum tercapai. Selanjutnya capaian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya pada usia lanjut masih rendah, hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh pelayanan kesehatan pada usia lanjut baru mencapai 25,93% dimana pelayanan kesehatan usia lanjut merupakan bagian dari SPM. Aspek lainnya partisipasi masyarakat sebagai sasaran kebijakan masih rendah, sebagai contoh masyarakat kurang aktif dalam memeriksakan kesehatan diri dan bayinya, dimana cakupan pelayanan Pneumonia pada Balita ditemukan dan ditangani oleh pihak tenaga kesehatan baru mencapai 45,45%.

Kesehatan masyarakat membantu individu, organisasi, dan masyarakat melawan penyakit, kematian, dan kecacatan yang dapat dicegah dengan menggunakan pencegahan meliputi mengurangi timbulnya masalah kesehatan dengan mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat. Perlindungan kesehatan dapat dilakukan meliputi surveilans dan pemantauan penyakit menular, tanggap darurat dan vaksinasi. Kebijakan kesehatan masyarakat sangat penting karena menerjemahkan teori dan penelitian kesehatan masyarakat ke dunia praktis. Kebijakan kesehatan masyarakat menciptakan tindakan dari penelitian dan menemukan solusi umum untuk masalah yang diidentifikasi sebelumnya, namun demikian dalam implementasinya setiap kebijakan akan menghadapi hambatan selain adanya faktor pendukung dalam mencapai tujuannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan dikatakan sebagai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang ingin dilakukannya. Kebijakan dapat bersifat positif atau negatif dalam arti pemerintah dapat memilih untuk bertindak atau tidak bertindak, dan

pemerintah dapat melarang atau memaksa warga negaranya untuk bertindak. Kebijakan tersebut berdasarkan hukum dan bersifat otoriter serta memaksa secara hukum. Kebijakan publik muncul sebagai akibat dari permasalahan di ruang publik yang harus diselesaikan. Masalah publik berbeda dari masalah pribadi baik dalam jumlah orang yang terkena dampak, atau dalam jumlah orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, atau dalam jumlah sumber daya dan jenis sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Kebijakan publik secara umum merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang, peraturan, keputusan atau dalam bentuk pedoman tentang subjek tertentu yang diberlakukan dalam memecahkan masalah publik. Kebijakan publik berfokus pada keputusan yang menghasilkan output dari sistem politik, seperti kebijakan transportasi, menjalankan layanan kesehatan masyarakat, mengelola sistem sekolah, bantuan sosial, dan mengatur kekuatan pertahanan negara.

Ada perbedaan antara kebijakan dan kebijakan publik, bahwa kebijakan mengejar tujuan tertentu, sebagai tindakan administrasi pemerintah, termasuk undang-undang, peraturan, keputusan atau perintah, sedangkan kebijakan publik adalah istilah yang lebih spesifik, yang mengacu pada serangkaian panjang tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik melalui pengembangan kebijakan. Istilah kebijakan publik (Dye, 2011, hal. 2) menyatakan: *"anything a government chooses to do or not to do"* yang dapat diartikan segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Easton (Islamy, 2004) menyatakan: "Kebijakan publik adalah mendistribusikan nilai kekuasaan untuk semua masyarakat yang mengikat". Kebijakan publik dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintah, dimana itu merupakan tindakan yang diarahkan pada tujuan tertentu, bukan perilaku acak atau insidental. Kebijakan muncul sebagai tanggapan atas tuntutan yang dibuat oleh aktor lain dalam pemerintahan, meskipun unit pemerintah yang berbeda dapat mengeluarkan kebijakan yang bertentangan sebagai tanggapan atas tuntutan dari kelompok yang berlawanan.

Agenda kebijakan mencakup hal-hal yang mendapat perhatian serius dari para pejabat pengambil keputusan. Hanya sejumlah kecil kebutuhan dan keinginan yang masuk dalam agenda kebijakan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Secara umum, itu tergantung pada kekuatan, status, keanggotaan dan sumber daya lain dari orang atau kelompok yang terkena dampak negatif dari masalah tersebut. Setiap kebijakan harus dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Definisi implementasi kebijakan (Dunn, 2003) dengan menyatakan: "Implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk memantau efek dari terbitnya kebijakan".

Menurut (Grindle, 1980, hal. 7) mengemukakan: "Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran". Hukum, aturan, atau tata cara yang dihasilkan dari tahap berlakunya dapat disebut kebijakan publik. Tanpa implementasi hampir tidak ada pengaruhnya, tetapi

tindakan implementasi dapat mengubah sifat dari kebijakan itu sendiri. Administrator publik sebagai pelaksana utama kebijakan publik. Lembaga administrasi publik seringkali memiliki kebebasan yang besar dalam implementasi kebijakan publik, namun legislatif memiliki tanggung jawab untuk mengawasi implementasi kebijakan oleh eksekutif.

Model dalam mengimplementasikan kebijakan dikemukakan Edward III (Kusnandar, 2012) dapat dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Model yang dikembangkan oleh Grindle (Rusli, 2015) menyatakan dua variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel konteks kebijakan (*context of policy*). Masih-masing model yang dikembangkan oleh para ahli memiliki persamaan dan perbedaan, dan tidak ada jaminan bahwa model yang digunakan dapat benar-benar dapat mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Kebijakan kesehatan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah dapat berupa undang-undang, peraturan, keputusan, pedoman yang diimplementasikan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh lembaga atau fasilitas kesehatan. Kebijakan kesehatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Pada dasarnya upaya kesehatan masyarakat mempromosikan kesejahteraan seluruh masyarakat, menjaganya tetap aman dan melindunginya dari penyebaran penyakit menular dan bahaya lingkungan, serta membantu memastikan akses ke perawatan kesehatan yang aman dan berkualitas.

METODE

Penelitian yang dilaksanakan termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan wawasan melalui pengalaman langsung, pelaporan yang jujur, dan kutipan dari percakapan secara nyata, dengan tujuan untuk memahami bagaimana partisipan mendapatkan makna dari lingkungannya dan bagaimana makna yang dapat memengaruhi perilaku terhadap objek yang diteliti.

Mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara secara mendalam dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tentang objek penelitian. Langkah yang dilakukan untuk menganalisis data penelitian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu dengan reduksi data penelitian, display data, melakukan penarikan kesimpulan dan memverifikasi data hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Puskesmas Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya selama ini telah memberikan manfaat dengan terlaksananya SPM bidang kesehatan. Keberadaan staf pegawai dan para tenaga medis sebagai pelaksana telah mampu memahami substansi pelayanan SPM sesuai perundang-undangan, dimana pelayanan yang diberikan oleh pihak Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sudah punya

standar sehingga pelayanan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang direncanakan. Dengan demikian jenis atau bentuk pelayanan Kesehatan telah memiliki kejelasan sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diterima dan berapa lama dia harus mendapatkan layanan kesehatan.

Dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan di Puskesmas Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, staf dan pegawai medis juga memiliki komunikasi yang baik, sehingga dalam melaksanakan tanggung jawabnya terkait kebijakan SPM tersebut lebih terkoordinir dengan baik, dimana masing-masing memiliki tugas sesuai bidang masing-masing. Dan tugas tersebut telah dijabarkan dalam Standar Pelayanan Minimal yang dijalankan. Secara garis besar substansi SPM bidang kesehatan pada era new normal yang diterapkan di Puskesmas Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sudah baik, dimana mampu menjelaskan poin-poin besar SPM di antaranya adalah perencanaan, kejelasan pelayanan dan waktu pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui UPTD Puskesmas Salopa memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin setiap warganya agar pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga tidak lepas dari kebutuhan dasar setiap masyarakat untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya khususnya dalam memelihara dan menjaga Kesehatan. Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan Kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab setiap masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian tingkat kesadaran masyarakat di Wilayah Kecamatan Salopa belum sepenuhnya mengerti, hal ini diperkuat dengan pernyataan dari masyarakat bahwa masih adanya beberapa masyarakat yang memilih berobat ke orang pintar atau ke dukung beranak khususn untuk ibu hamil.

Faktor sosial ekonomi masyarakat diketahui mata pencaharian penduduk Kecamatan Salopa mayoritas buruh tani, pedagang dan pengrajin, sehingga apabila dilihat dari status ekonomi cenderung berpenghasilan rendah dan memiliki penghasilan tidak tetap. Tentu saja hal ini akan berdampak pada lingkungan Kesehatan masyarakat. Dimana kecenderungan masyarakat berpenghasilan rendah sangat berpotensi meningkatnya beragam penyakit yang diderita oleh masyarakat. Dengan adanya Puskesmas di Kecamatan Salopa diharapkan dapat membantu meringankan masyarakat yang ingin berobat atau memerlihora kesehatannya, baik untuk ibu hamil, ibu bersalin, balita maupun lansia.

Berdasarkan hasil ini menunjukkan implementasi kebijakan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Salopa Kabupaten Tasikmalaya ditentukan oleh adanya *variable idealized policy* dilihat dari aspek dorongan terhadap pelaksana kebijakan, dan pengaruhnya terhadap pelaksana kebijakan, serta rangsangan untuk melaksanakan kebijakan, selanjutnya dari *target group* meliputi cara kerja dari para pelaksana di Puskesmas Salopa, dan pelaksanaan komunikasi dalam melaksanakan kebijakan, sementara untuk variabel *implementing organization* dilihat dari adanya struktur organisasi terkait dengan pembagian tugas, disertai dengan Standard

operasional prosedur (SOP) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan terakhir variabel *environmental factors* yang dilihat dari budaya masyarakat setempat, aspek sosial masyarakat, dukungan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan, dan tingkat ekonomi masyarakat setempat.

Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya beberapa hambatan dalam mencapai keberhasilan dalam mencapai kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Beberapa permasalahan diantaranya masih adanya program kegiatan yang belum tercapai dengan tidak terealisasi penggunaan anggarannya, sehingga memerlukan perencanaan yang lebih matang dan penentuan waktu pelaksanaan yang lebih akurat, serta masih kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya. Sementara faktor pendukung diantaranya telah adanya badan pelaksana dalam hal ini UPTD Puskesmas Salopa Kabupaten Tasikmalaya yang dilengkapi dengan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kebijakan berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat bidang kesehatan.

Diterbitkannya sebuah kebijakan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Berkaitan dengan kebijakan terkait dengan standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan untuk memberikan kepastian dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Setiap pelaksana, dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada peraturan yang berlaku, dimana dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya yang dimiliki implementor, karena tanpa dukungan tersebut, tujuan kebijakan akan sulit dicapai.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan terkait dengan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di UPTD Puskesmas Salopa Kabupaten Tasikmalaya masih membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana, kefarmasian, disamping yang paling pokok yaitu kelengkapan tenaga medis yang dapat memberikan diagnosa terhadap pasien di puskesmas. Ketersediaan tenaga medis menjadi faktor utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ditunjang oleh kelengkapan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Balai Aksara.
- Dye, T. R. (2011). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Grindle, M. (1980). *Politic and policy implementation In the Third World*. Princeton University Press.
- Islamy, I. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika.

Kusnandar, I. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Multazam.

Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.